

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
REGIONAL DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**INDAH PRAMANA
NIM. 180604053**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Indah Pramana
NIM : 180604053
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

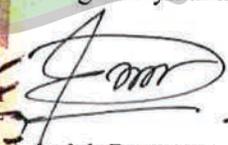
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Indah Pramana



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Indah Pramana
NIM: 180604053

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005

Abrar Amri, SE., S.Pd.I. M.SI
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

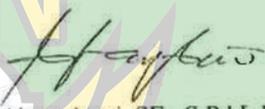
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005


Abrar Amri, SE., S.Pd.I. M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I

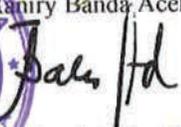
Penguji II


Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si
NIP. 1970091719970031002


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Indah Pramana
NIM : 180604053
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 180604053@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Penulis,

Indah Pramana
NIM. 180604053

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005

Abrar Amri, SE., S.Pd.I. M.Si
NIDN. 0122078601

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh”**.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi sekaligus pembimbing I dan Marwiyati, SE., MM sebagai Sekretaris program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Arifin, Ph, D Selaku Ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, S.E., M.Sc. Selaku Asisten Laboratorium Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-

Raniry yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai percetakan skripsi.

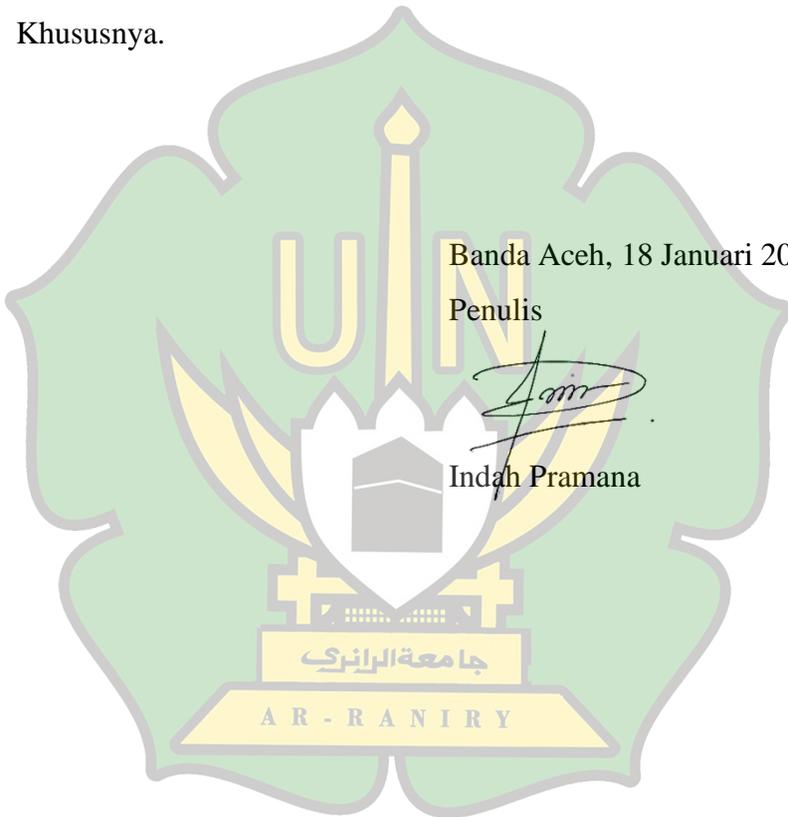
4. Abrar Amri, SE., S.Pd.I. M.SI. Selaku dosen pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi selama ini.
5. Cut Elfida, S.HI., MA. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, Abang, Adik dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan do'a serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Nur Cahya, Nurul Farida, Nurul Ulfa, Dina Marlinda dan Putri dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Leting 18 Ilmu Ekonomi yang telah mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan umumnya dan yang terkait Khususnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2022

Penulis


Indah Pramana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Kosonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa: كيف

haula: هول

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.



ABSTRAK

Nama : Indah Pramana
NIM : 180604053
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu
Ekonomi
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Regional di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I. M.SI
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi komponen yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, disamping itu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik harus di dukung oleh sumber pendapatan daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan merupakan data PAD, DAU, dan DAK setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama 5 tahun, dari tahun 2016-2020. Analisis data adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Kemudian DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Serta secara simultan PAD, DAU dan DAK bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

DAFTAR ISI

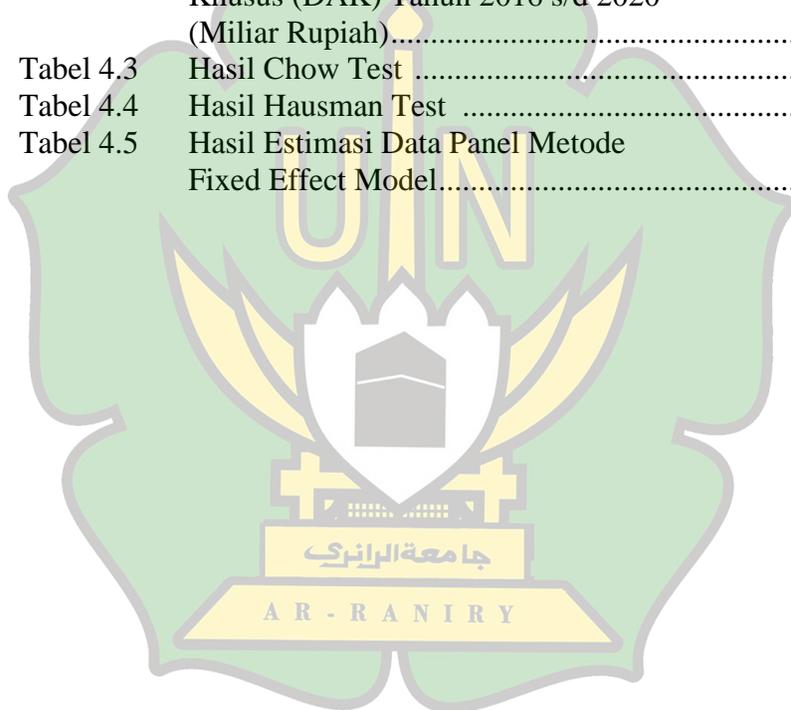
	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR RUMUS	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.2 Tolak Ukur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.2.1 Pajak Daerah	24
2.2.2 Retribusi Daerah	30
2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39

2.2.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39
2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	40
2.3.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)	40
2.3.2	Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)	41
2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	41
2.4.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)	42
2.4.2	Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)	43
2.5	Keterkaitan Antar Variabel	44
2.5.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	44
2.5.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	45
2.5.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	45
2.6	Penelitian Terkait	46
2.7	Kerangka Berpikir	49
2.8	Hipotesis Penelitian	50
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Jenis dan Sumber Data	52
3.3	Populasi dan Sampel	53
3.4	Variabel Penelitian	53
3.4.1	Klasifikasi Variabel	53
3.5	Metode Analisis Data	56
3.5.1	Analisis Regresi Data Panel	56
3.5.2	Estimasi Model Regresi Data Panel	56
3.5.3	Pemilihan Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel	59

3.6 Uji Signifikansi (Uji T)	60
3.7 Uji Simultan (Uji F)	61
3.8 Estimasi (R^2)	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.2 Deskripsi Penelitian	64
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	66
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	67
4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	68
4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	69
4.3 Estimasi Regresi Data Panel	70
4.3.1 Chow Test	70
4.3.2 Hausman Test	71
4.4 Model Regresi Panel Fixed Effect Model	72
4.5 Uji Signifikansi (Uji T)	75
4.6 Uji Simultan (Uji F)	76
4.7 Estimasi R^2	77
4.8 Pembahasan Penelitian	77
4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh	77
4.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh	78
4.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	46
Tabel 3.1 Definisi Operasional	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	63
Tabel 4.2 PDRB (ADHK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah).....	65
Tabel 4.3 Hasil Chow Test	71
Tabel 4.4 Hasil Hausman Test	72
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Data Panel Metode Fixed Effect Model.....	73



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	PDRB (ADHK) Kab//Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	3
Gambar 1.2	Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 ...	6
Gambar 1.3	Grafik Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 ...	8
Gambar 1.4	Grafik Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 ...	10
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran	49
Gambar 4.1	Peta Wilayah di Provinsi Aceh	62
Gambar 4.2	Grafik PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)	66
Gambar 4.3	Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)	67
Gambar 4.4	Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)	68
Gambar 4.5	Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)	69



DAFTAR SINGKATAN

PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
BPS	: Badan Pusat Statistik
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
CEM	: Common Effect Model
FEM	: Fixed Effect Model
REM	: Random Effect Model
Ln	: Logaritma Natural
Kemenko	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Persamaan Regresi Data Panel.....	56
Rumus 3.2 Persamaan Estimasi Regresi Data Panel dengan In	56
Rumus 3.3 Persamaan <i>Common Effect Model</i> dengan In.....	57
Rumus 3.4 Persamaan <i>Fixed Effect Model</i> dengan In	57
Rumus 3.5 Persamaan <i>Random Effect Model</i> dengan In	58



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Data PDRB (ADHK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	88
Lampiran 2	Data In PDRB (ADHK), In Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	95
Lampiran 3	<i>Common Effect Model (CEM)</i>	102
Lampiran 4	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	103
Lampiran 5	<i>Random Effect Model (REM)</i>	104
Lampiran 6	<i>Chow Test</i>	105
Lampiran 7	<i>Hausman Test</i>	106
Biodata	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi komponen yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal tersebut akan memicu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan daerah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mengenali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan optimal.

Menurut Sukirno (2012: 423) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi sektor modal yang biasa digambarkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

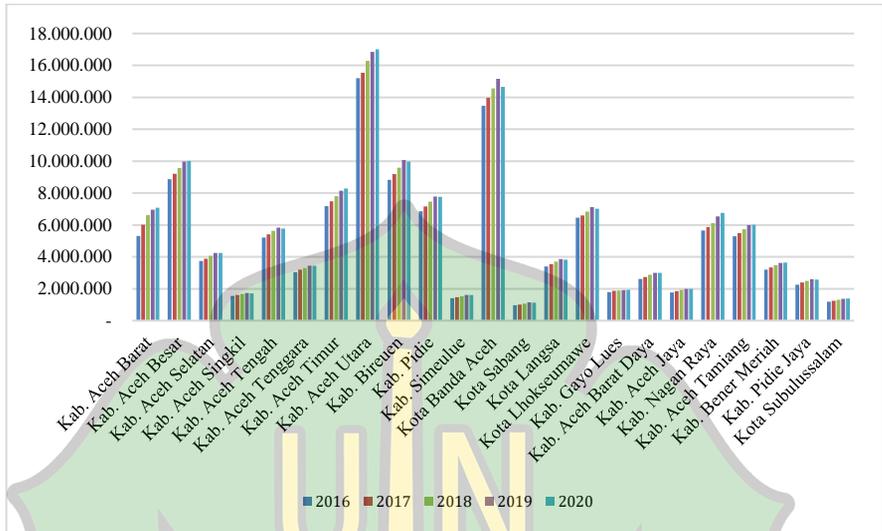
Indonesia adalah salah satu negara sedang berkembang yang mengedepankan pembangunan secara berencana dan bertahap untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat (Syahputra, 2017). Dalam dua tahun terakhir kondisi ekonomi Indonesia mampu menahan kontraksi

ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07%, hal ini disebabkan akibat adanya pandemi Covid-19. Penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 7,07% pada Triwulan II-2021 (Kemenko Perekonomian, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai setiap tahunnya menggambarkan seberapa besar prestasi dan kesuksesan negara dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengelola setiap aktivitas produksinya dalam jangka panjang. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, secara makro meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perubahan pendapatan riil dalam jangka waktu panjang, nilai kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan otonomi khusus, dimana Aceh adalah provinsi yang mempunyai *record* pertumbuhan ekonomi regional yang baik. Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan hasil nilai tambah barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Berikut grafik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab/Kota di Aceh pada periode 2016 s/d 2020:

Gambar 1.1 Grafik PDRB (ADHK) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2021)

Dari grafik di atas diketahui PDRB tertinggi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara, dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 15.195.596, tahun 2017 sebesar 15.544.943, tahun 2018 sebesar 16.286.459, tahun 2019 sebesar 16.852.697 dan tahun 2020 sebesar 17.015.453. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Utara lebih unggul dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang berada di Provinsi Aceh.

Adisasmita (2013: 103) menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu

negara bergantung pada sumber daya alamnya (SDA), sumberdaya manusia (SDM), modal usaha, teknologi dan lainnya. Disamping faktor ekonomi, perlu adanya penunjang dari faktor non ekonomi yaitu adanya pengaruh dari lembaga-lembaga sosial, sikap masyarakat, kelembagaan politik, dan lainnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat melimpahkan wewenang atau tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari desentralisasi.

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan di dukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dasar dari inisiatif desentralisasi adalah agar pemerintah dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga hasil dari program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di level daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

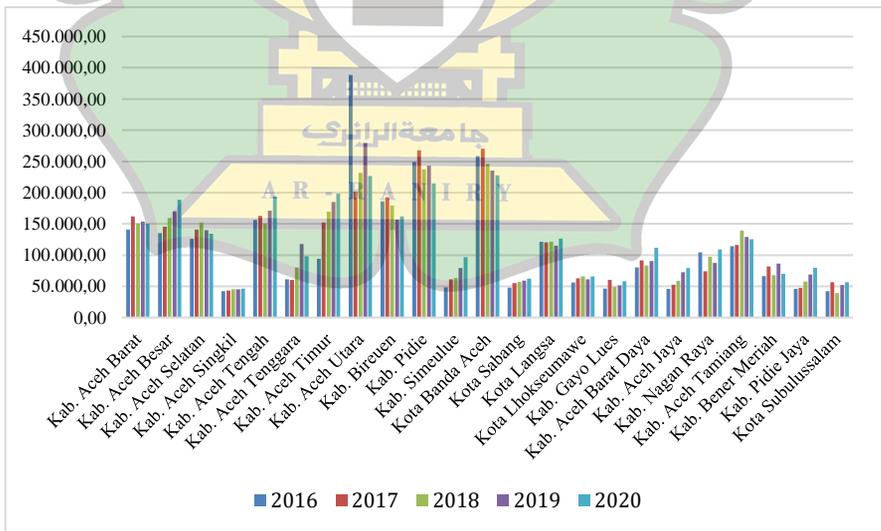
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan juga bersumber dari Pendapatan Daerah itu sendiri. Setiap daerah yang mampu untuk merealisasikan potensi ekonomi yang ada dan dapat menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka daerah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menyediakan pendanaannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rosidin (2015: 397) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui insensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. PAD setiap daerah tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya, dimana daerah yang berpotensi akan sumber daya alam melimpah dan memiliki kemampuan di bidang industri cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah, karena di satu sisi ada daerah yang kaya akan PAD dan di sisi lain ada daerah tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Ketimpangan fiskal dapat terjadi, apabila kemampuan keuangan di suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda dalam mendanai kegiatan – kegiatan daerah tersebut. Dengan demikian, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini peran pemerintah pusat yaitu dapat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam pelaksanaan desentralisasi yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah. Dimana pemerintah pusat akan menstransfer dana

perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya melalui peningkatan PAD, DAU dan DAK. Sumber keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan PAD, DAU, dan DAK, maka dalam pelaksanaan otonomi khusus, peningkatan PAD menjadi prioritas yang selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan daerah serta harus berdampak terhadap perekonomian daerah. Berikut grafik realisasi pendapatan asli daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)



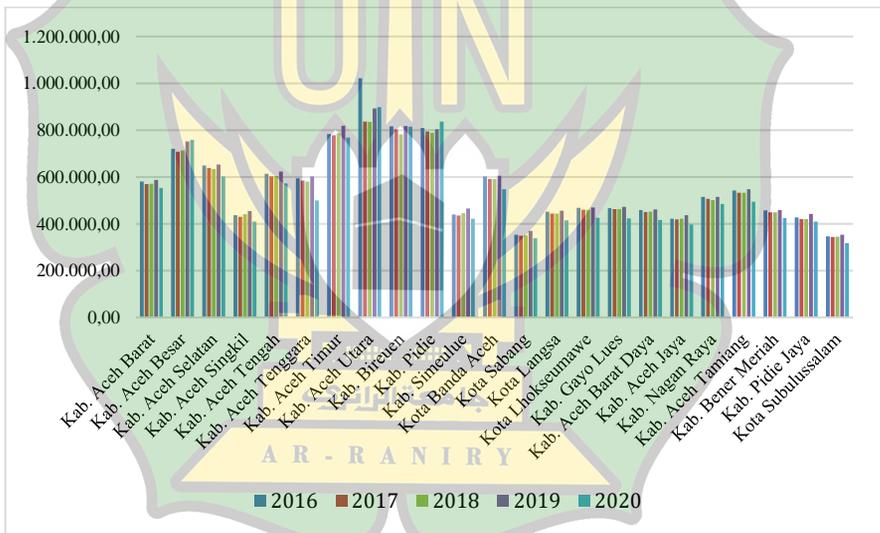
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diolah (2021)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berada di Kota Banda Aceh sebesar Rp. 227.747,62 Sementara, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi berada di Kabupaten Aceh Utara. Dimana pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar Rp 388.251,80 tahun 2017 sebesar Rp 202.091,56 tahun 2018 sebesar 231.848,85 tahun 2019 sebesar Rp 279.567,72 dan tahun 2020 sebesar Rp 226.828,86. Dapat disimpulkan Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 5 tahun unggul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Pemerintah Pusat menetapkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum bertujuan untuk mengatasi terjadinya ketimpangan infrastruktur yang terdapat pada setiap wilayah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata (Dewi dan Suputra, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10 % dan 90 % dari DAU yang telah ditetapkan. Setiap daerah memiliki perbedaan antara struktur dan kemampuan

fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*), melalui kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat menjadi instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Alokasi DAU bagi wilayah yang memiliki potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan menerima alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, wilayah yang memiliki potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan menerima alokasi DAU yang relatif besar. Berikut grafik realisasi dana alokasi umum Kab/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 1.3 Grafik Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diolah (2021)

Dari grafik di atas dapat diketahui dalam 5 tahun terakhir 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki realisasi dana alokasi umum yang tinggi berada di Kabupaten Aceh Utara. Dimana pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar Rp 1.021.636,68 tahun 2017 sebesar Rp 837.370,11 tahun 2018 sebesar 835.915,56 tahun

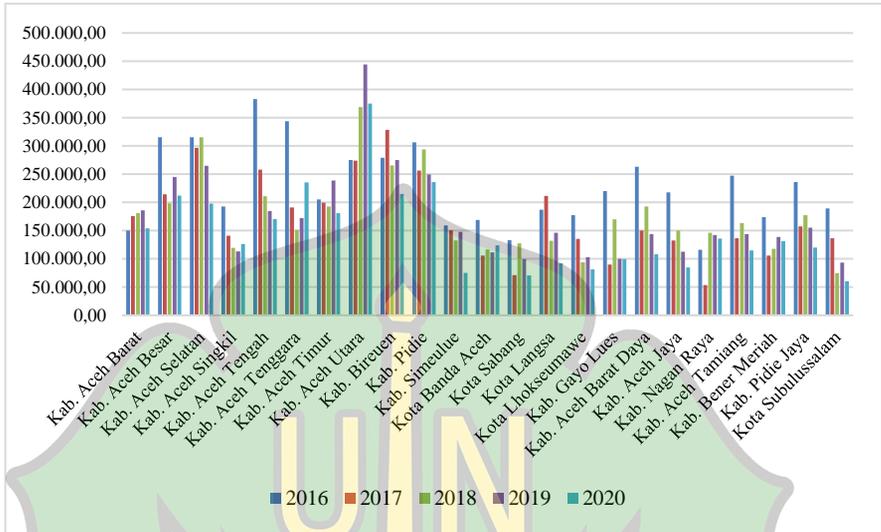
2019 sebesar Rp 893.015,39 dan tahun 2020 sebesar Rp 897.980,13. Dapat disimpulkan Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 5 tahun unggul dalam merealisasikan dana alokasi umum dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan bagi daerah yang dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kabupaten dan kota dengan maksud membiayai kebutuhan daerah yang bersifat khusus (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bersifat khusus yang dimaksud yaitu: (i) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, artinya kebutuhan suatu wilayah berbeda dengan kebutuhan daerah lain, seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran imigrasi primer, dan (iii) kebutuhan yang menjadi komitmen atau prioritas nasional.

DAK termasuk dana yang berasal dari dana reboisasi. Dana reboisasi dibagi dengan perimbangan, dimana 40 % dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus dan sebanyak 60 % untuk pemerintah pusat kecuali dalam rangka reboisasi. Daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan (Widjadja, 2015). Berikut grafik realisasi dana alokasi khusus Kab/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 1.4

Grafik Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diolah (2021)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Kab/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki dana alokasi khusus tertinggi pada tahun 2016 berada di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 382.808,760. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki realisasi dana alokasi khusus yang tinggi berada di Kabupaten Aceh Utara. Dimana dana alokasi khusus 2016 sebesar Rp 275.015,67 tahun 2017 sebesar Rp 273.832,21 tahun 2018 sebesar Rp 368.966,29 tahun 2019 sebesar Rp 444.119,79 dan tahun 2020 sebesar Rp 375.269,15. Dapat disimpulkan Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 5 tahun unggul dalam merealisasikan dana alokasi khusus.

Menurut Kusumawati dan Wiksuana (2018) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari ketiga komponen tersebut, indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah semestinya dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dengan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya potensial dalam daerah tersebut.

Maka arah penelitian ini merujuk kepada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) dengan judul pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta hasil analisis lainnya menunjukkan bahwa belanja modal dapat digunakan sebagai variabel intervening untuk melihat hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh AR dan Zein (2016) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

menunjukkan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan Rarung (2016) dengan judul pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh PAD terhadap PDRB yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Manado berpengaruh signifikan, artinya perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan PAD yang terealisasi di Kota Manado. Pengaruh DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang terealisasi di Kota Manado, artinya perkembangan PDRB di Kota Manado tidak terlalu dipengaruhi oleh DAU yang diterima.

Penelitian yang dilakukan Talangamin, Kindagen dan Koleangan (2018) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya kenaikan pendapatan asli daerah juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila dana alokasi umum meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif

terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya peningkatan dana alokasi khusus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Mokoworo, Rotinsulu, dan Engka (2020) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana bagi hasil bertanda positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus bertanda positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini sebagai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh?
2. Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh?
3. Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh?
4. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk tema yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Penelitian juga dapat menjadi bahan acuan dalam proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini serta sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh untuk dapat mengoptimalkan dan merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah dengan semestinya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, ruang lingkup variabel terkait, penelitian terkait, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat secara terperinci tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis.

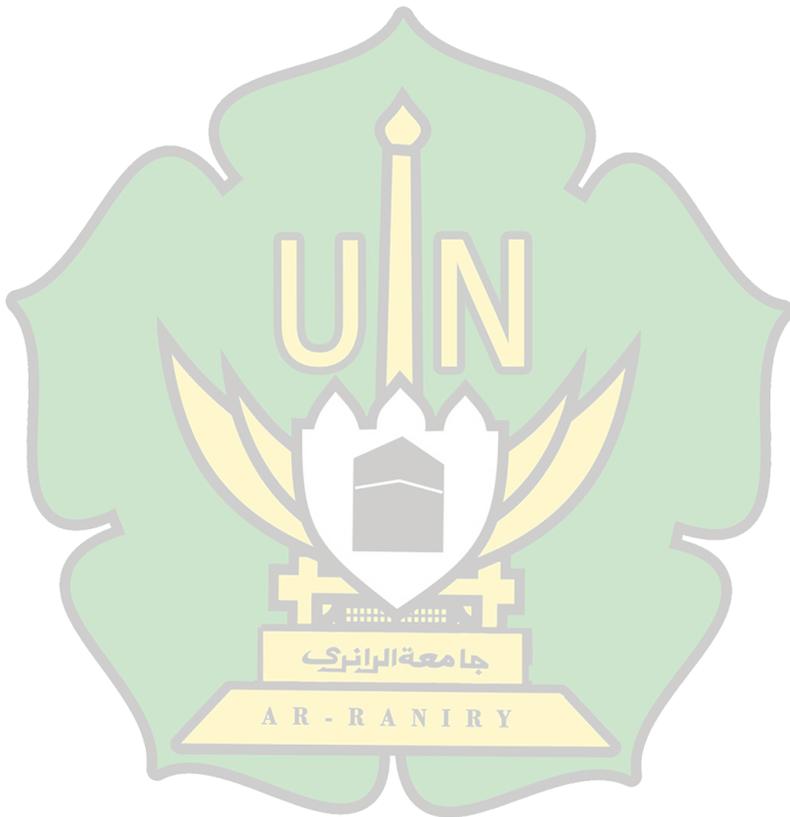
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan deskripsi objek dari penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil analisis objek penelitian yang ada.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data dan saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012: 423) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi sektor modal yang biasa digambarkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Dimana, kedua peningkatan tersebut sering dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur seberapa jauh prestasi ekonomi suatu negara. Sebenarnya dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang biasanya terjadi di suatu negara yaitu penambahan produksi barang dan jasa serta diikuti perkembangan infrastruktur (Suhardi, 2018).

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menggambarkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan juga ikut meningkat, sementara semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi

maka kesejahteraan juga akan menurun. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menjadi evaluasi untuk Pemerintah, tepat atau tidaknya langkah kebijakan yang diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana prestasi setiap daerah dalam memajukan kegiatan ekonomi di daerahnya sendiri. Oleh karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2012: 103-106) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Sumber Daya Alam

Tersedianya kekayaan sumber daya alam yang potensial dapat menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar. Sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan sumber daya alam yang diusahakan dapat menguntungkan, maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal merupakan peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif, yaitu keberadaan tabungan nyata dan pertambahannya, memobilisasi tabungan dan

menyalurkan ke bidang usaha yang dikehendaki dan mempergunakan tabungan untuk investasi. Akumulasi modal sebagai permintaan yang efektif dan di lain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan.

3. Kemajuan Teknologi

Perubahan pada teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lain. Schumper menganggap inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets, Inovasi terdiri dari dua macam, yaitu penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk dan pembaharuan yang menciptakan permintaan baru akan produk tersebut.

4. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Adam Smith menekankan pentingnya pembagian tenaga kerja (*division of labour*) bagi perkembangan ekonomi, karena dapat menciptakan perbaikan kemampuan produksi buruh. Pembagian kerja bergantung pada luas pasar, sementara luas pasar tergantung pada kemajuan teknologi, yaitu berapa besar perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi dan lainnya. Apabila skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan menjadi luas pula, produksi meningkat, maka laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2.1.2 Tolak Ukur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kusumati dan Wiksuana (2018) pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni hasil jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat dua metode yang dapat digunakan, antara lain:

1. Metode Langsung, dapat dipakai melalui tiga macam pendekatan yaitu:
 - a. Pendekatan Produksi
PDRB adalah hasil jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang/jasa yang diperoleh dari bagian-bagian produksi di suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sedangkan NTB merupakan Nilai Produksi Bruto dari barang/jasa yang dikurangi seluruh biaya antara yang telah digunakan dalam proses produksi.
 - b. Pendekatan Pendapatan
PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diambil dari faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi di suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto merupakan total dari

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan dan yang berkaitan dengan sebelum pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan total seluruh pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan persediaan ekspor neto di dalam suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto berpusat pada pemakaian akhir dari barang/jasa yang diproduksi.

2. Metode Tidak Langsung

a. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yaitu total seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan oleh bagian-bagian dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto ADHB diperoleh dari hasil pengurangan NTB dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. Nilai Tambah Bruto menggambarkan perubahan volume produksi yang dihasilkan serta tingkat perubahan harga dari masing-masing aktifitas, subsektor dan sektor.

b. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) penilaiannya digunakan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto ADHK menggambarkan hanya perubahan volume produksi. Pengaruh perubahan harga diganti

dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Perhitungan ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau sektoral serta untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah setiap tahun.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Adisasmita (2013: 397) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperoleh oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan atau penerimaan daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Khusaini (2018) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masing-masing individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria yang dapat dijadikan petunjuk untuk penetapan sumber penerimaan pada tingkat pemerintahan yang berbeda mencerminkan peran ganda dari pajak. Pertama, pajak dimaksudkan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah sehingga penerimaan dari pajak dapat digunakan untuk dialokasikan pada penyediaan barang dan jasa publik. Kedua, pajak dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk meraih realisasi tujuan kebijakan pemerintah, sehingga pengenaanya mengarah pada tindakan dan hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah bayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang dibebankan kepada individu atau badan sebagai bayaran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dirasakan, yang bersifat diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

a. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak Kabupaten atau Kota sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
9. Pajak Air Tanah
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Prinsip-Prinsip Penetapan Pajak Daerah

Pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan berbagai prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Menurut Khusaini (2018) terdapat beberapa prinsip pajak daerah diantaranya adalah:

1. Kecukupan dan Elastisitas

Pajak daerah harus memiliki prinsip kecukupan untuk menutup biaya penyelenggaraan jasa publik dan elastisitas untuk mendapatkan kapasitas yang akan menghasilkan tambahan pendapatan. Pajak daerah dalam elastisitas dapat memberikan peningkatan jasa-jasa publik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

2. Keadilan (*equity*)

Pajak daerah dalam prinsip keadilan berarti beban pemeliharaan pengeluaran publik harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai proporsi tingkat kekayaan masing-masing individu. Tiga dimensi konteks perpajakan daerah dalam prinsip keadilan yaitu pertama, pengenaan pajak harus sesuai dengan kondisi pendapatan seseorang yang berbeda-beda. Kedua, harus disesuaikan juga dengan sumber pendapatannya. Ketiga, pengenaan pajak harus adil sesuai dengan daerah geografisnya.

3. Kepastian Administratif (*Administrative Capacity*)

Prinsip ini menjelaskan kemudahan administratif terhadap ketergantungan atas penerimaan tidak

langsung. Administratif pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung serta memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para wajib pajak.

4. Keberterimaan Politik

Pajak daerah harus bisa diterima secara politis oleh kalangan masyarakat, sehingga kehadiran penetapan pajak dapat menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak. Secara umum, pajak biasanya lebih tidak sensitif secara politis apabila tidak dikenakan secara langsung dan tidak melibatkan terlalu banyak keputusan-keputusan politik, seperti keputusan parlemen untuk menaikkan pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Khusaini (2018) membagi sistem pemungutan pajak daerah menjadi tiga, yaitu:

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self-assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau

pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding* yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan sebesar PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

d. Langkah Strategis Meningkatkan Penerimaan Pajak Khusaini (2018) menjelaskan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu:

a. Perluasan basis penerimaan daerah

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan adalah perluasan basis penerimaan daerah.

Ada empat hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini:

1) Mengidentifikasi pembayar pajak dan tarif baru besarnya pajak yang dibayarkan dan membawa mereka ke dalam jaring pajak.

2) Meningkatkan basis data objek pajak.

3) Meningkatkan penilaian (missal penilaian ulang atas objek pajak)

4) Menghitung kapasitas penerimaan secara lebih rasional untuk tiap jenis pungutan.

b. Pengendalian Penghindaran Pajak

Untuk mengurangi kebocoran pajak akibat penghindaran pajak, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Melakukan audit incidental sebagai pelengkap prosedur penilaian sendiri.
- 2) Meningkatkan proses kontrol untuk mengurangi kebocoran.
- 3) Menetapkan sanksi yang ketat dan berat bagi yang tidak mematuhi.
- 4) Meningkatkan disiplin administratif staf-staf keuangan yang juga punya andil dalam kebocoran penerimaan daerah.
- 5) Meningkatkan usaha untuk mengaitkan pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c. Peningkatan Persyaratan Penarikan Pajak

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan persyaratan penarikan pajak yaitu mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

d. Peningkatan Efisiensi Administratif Pajak

Peningkatan kinerja penerimaan sangat bergantung kepada kemampuan otoritas lokal untuk meminimalkan biaya memperoleh penerimaan tersebut. Ada empat kemungkinan langkah yang dapat diambil oleh

pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administratif:

- 1) Memperbaharui prosedur administratif pajak melalui penyederhanaan administrasi.
- 2) Meningkatkan usaha untuk menghitung efisiensi pengumpulan tiap jenis penerimaan.
- 3) Peningkatan usaha pengurangan biaya pengumpulan
- 4) Mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penerimaan menjadi tidak optimal.

e. Perencanaan

Memastikan strategi perencanaan pendapatan yang baik, dengan tidak adanya perencanaan terkoordinasi dan sistematis, akan sulit untuk mengharapkan kenaikan penerimaan daerah.

2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang disebut dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuntut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi.

Retribusi daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa dan mendapat prestasinya kembali secara langsung. Unsur pemaksanya bersifat ekonomis, yaitu pembayaran retribusi perizinan tertentu dikenakan kepada pihak yang berkepentingan agar orang tersebut memperoleh izin yang diperlukan (Khusaini, 2018).

Dari definisi retribusi menurut UU dan yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas untuk kepentingan individu atau badan yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Khusaini, 2018).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah guna kepentingan dan kemanfaatan umum juga dapat dirasakan oleh individu atau badan. Ciri-ciri retribusi jasa umum adalah jasa yang termasuk urusan Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada daerah, memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya, dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah, dan kualitas dan pelayanan yang bagus.

Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil

Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

- e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. **Retribusi Pelayanan Pasar**
Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelaratan/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. **Retribusi Penggantian Cetak Peta**
Peta yang dimaksud adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- j. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**
Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip-prinsip komersial karena dasarnya juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Kriteria dan ciri-ciri retribusi jasa usaha adalah bukan pajak, bukan

retribusi umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu dan jasa yang disediakan bersifat komersial. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Jasa Usaha terbagi menjadi 11 jenis retribusi antara lain:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f. Retribusi Penginapan/Pesanggerahan/Villa

Retribusi penginapan/pesanggerahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggerahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyebrangan di Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas beberapa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada individu atau badan yang bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu. Kriteria dan ciri-ciri retribusi perizinan tertentu merupakan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah, perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam

pemberian izin ini adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan bangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan (HO)

Izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

e. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan

f. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Khusaini (2018) mengatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian kekayaan daerah yang dikelola dan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibedakan menjadi dua yaitu kekayaan daerah dikelola secara sendiri menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan pemerintah dapat bertindak sebagai pemegang saham yang diwakilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada swasta atau kelompok usaha masyarakat

2.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan penerimaan daerah yang tidak menjadi bagian dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari:

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembiayaan suatu daerah secara umum.

Dana Alokasi Umum berfungsi untuk pemerataan atas kemampuan keuangan daerah dalam rangka ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan bagian yang satu dengan penerimaan umum. DAU biasanya digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah. DAU termasuk transfer tak bersyarat, yang berarti jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Transfer dari pemerintah pusat sangat berguna untuk pemerintah daerah dalam menjaga dan menjamin tercapai standar pelayanan publik di suatu daerah.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 104/2000 tentang Dana Perimbangan DAU yang diterima oleh masing-masing daerah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

Alokasi dasar, yakni jumlah seluruh PNS yang ada di daerah

1. Jumlah penduduk yang ada di daerah
2. Luas wilayah daerah
3. PAD yang dihasilkan setiap periode
4. DBH yang didapat dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

2.3.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) diantaranya ialah:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan bersih dalam negeri yang telah disahkan dalam APBN.
2. Proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai imbalan 10% dan 90%
4. Total keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ditetapkan dalam APBN.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari adanya penyerahaan wewenang pusat kepada daerah.

Menurut Suhardi (2018) Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dana dari APBN yang disalurkan kepada masing-masing daerah bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan maupun aktifitas secara khusus dan sudah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerinah daerah.

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Khusaini (2018) menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lain:

1. Daerah tertinggal masih sering dijumpai
Dimana daerah tersebut belum mampu dalam mendanai seluruh pengeluarannya. Sehingga, dengan adanya peran DAK mampu membiayai seluruh kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

2. Pemerataan Pembangunan yang tidak merata

Dimana dengan adanya penyaluran DAK dapat menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah masih tertinggal.

3. Pengangguran yang semakin banyak

Penyaluran DAK dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas perluasan kerja dan diversifikasi ekonomi terkhusus di daerah pedesaan, melalui berbagai kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi angka pengangguran.

2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Perhitungan dana alokasi umum dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK setiap daerah

Khusaini (2018) menjelaskan penentuan daerah tertentu harus dapat memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria umum, diasumsikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria khusus, diasumsikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otsus dan karakteristik daerah.

- c. Kriteria teknis, disusun sesuai indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rosidin (2015: 397) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui insensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. PAD setiap daerah tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya, PAD memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memajukan perekonomian wilayah (Rarung, 2016).

Melalui belanja pembangunan, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dimana, peningkatan aktivitas tersebut mampu meningkatkan sejumlah output barang dan jasa yang diikuti dengan meningkatkan jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, hal tersebut akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (AR dan Zein, 2016). Dapat disimpulkan bahwa kenaikan PAD, dapat memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dan ketersediaan infrastruktur publik menjadi kunci dari pertumbuhan seiring dengan meningkatnya produktivitas.

2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Penentuan DAU dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah (Zuwesty, 2015).

Berdasarkan dari penelitian AR & Zein (2016) dan Mokoworo, Rotinsulu & Engka (2020) menyimpulkan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Selanjutnya, DAU sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana, apabila DAU mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah. DAK memiliki peran dalam peningkatan pembiayaan

belanja pemerintah melalui belanja modal pemerintah daerah yang akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

Berdasarkan dari penelitian Talangamin, Kindagen, dan Koleangan (2018) menyimpulkan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan DAK dalam pembiayaan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif menandakan bahwa kenaikan dana alokasi umum, juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kenaikan DAK suatu daerah yang semakin tinggi tidak selalu semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena DAK hanya digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi kebutuhan daerah dan yang merupakan prioritas nasional.

2.6 Penelitian Terkait

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siswiyanti (2015)	Kuantitatif Menggunakan Analisis Jalur	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sama-sama meneliti variabel PAD, DAU dan DAK.	Penelitian Siswiyanti menggunakan alat analisis berupa analisis jalur dan menggunakan variabel intervening yaitu belanja modal.

Tabel 2.1-Lanjutan

2.	AR dan Zein (2016)	Kuantitatif Menggunakan Regresi Linear Berganda	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.	Sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sama-sama meneliti tentang variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.	Penelitian AR dan Zein menggunakan variabel bebas dana bagi hasil.
3.	Rarung (2016)	Kuantitatif Menggunakan Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kota Manado. Sementara DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB di Kota Manado.	Sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sama-sama meneliti tentang variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.	Penelitian Rarung memilih lokasi penelitian di Kota Manado.
4.	Talangamin, Kindagen dan Koleangan (2018)	Kuantitatif Menggunakan Regresi Linear Berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon,	Sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sama-sama meneliti tentang	Penelitian Talangamin, Kindagen dan Koleangan memilih lokasi penelitian di Kota Tomohon.

Tabel 2.1-Lanjutan

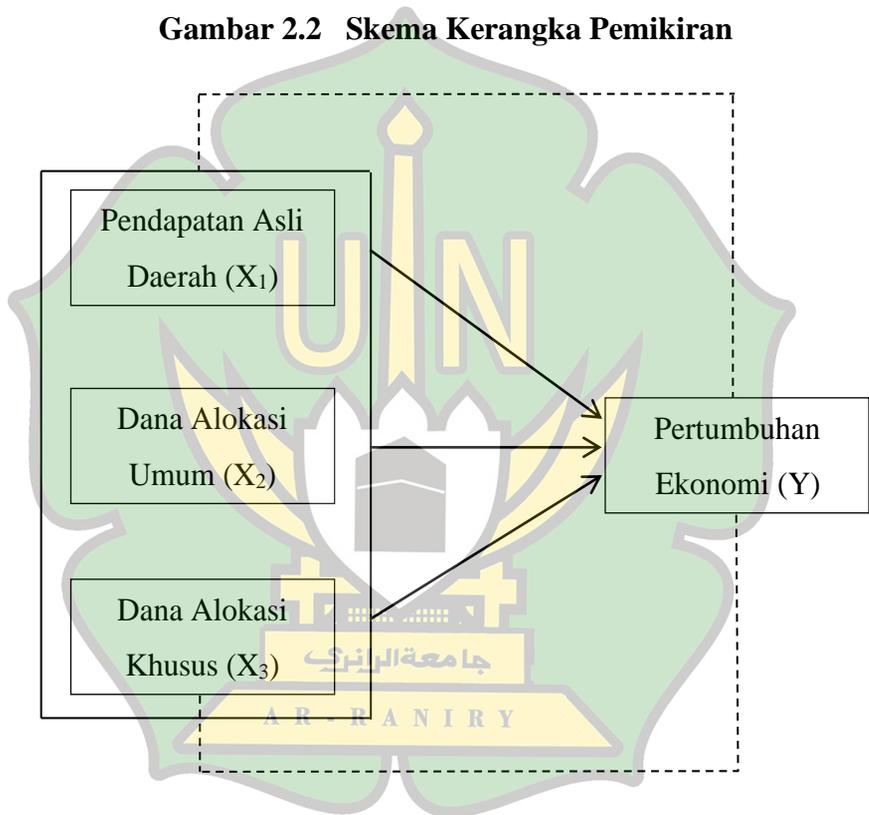
			sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon.	pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.	
5.	Mokorowu, Rotinsulu dan Engka (2020)	Kuantitatif Menggunakan Regresi Linear Berganda	Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara.	Sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sama-sama meneliti variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.	Penelitian Rahmah dan Basri menggunakan variabel bebas dana bagi hasil.

Sumber: Data Diolah (2021)

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran dari seluruh kegiatan dalam penelitian, mulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian. Kerangka berpikir bertujuan untuk memudahkan arah di dalam penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian:

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran



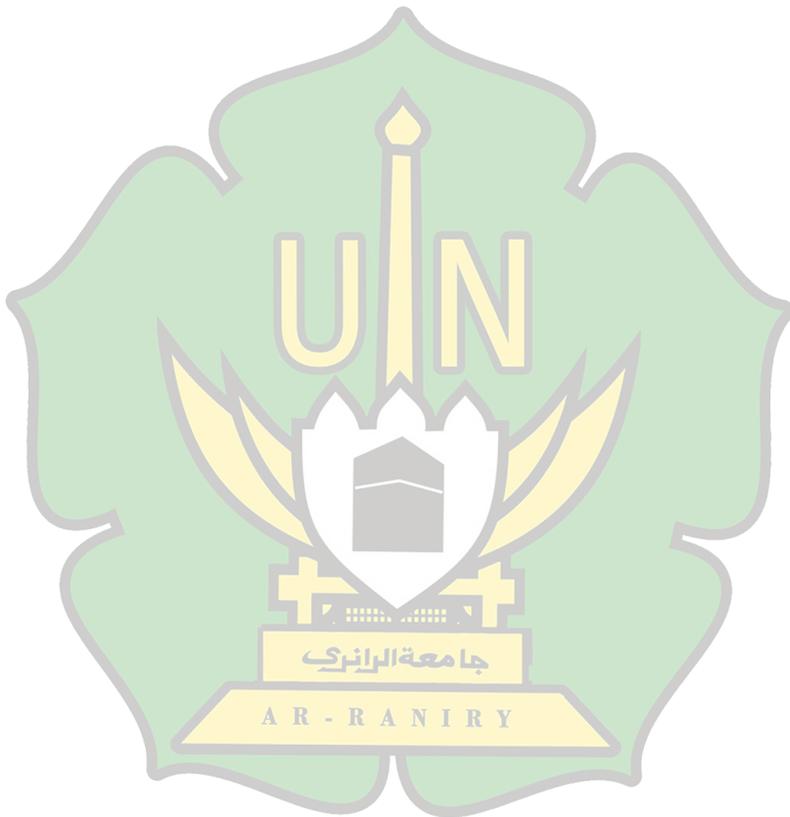
Sumber: Olahan Peneliti (2021)

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

- H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- H_{01} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a2} : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{02} : Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a3} : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{03} : Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a4} : Terdapat pengaruh signifikan PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H₀₄ : Tidak terdapat pengaruh signifikan PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat berbentuk apa saja misalkan berbentuk objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Basuki (2017: 254) menyatakan bahwa data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* yang diperoleh dan dikumpulkan oleh sumber-sumber di luar organisasi, diantaranya publikasi pemerintah, buku serta majalah. Dalam hal ini peneliti mengambil data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan BPS Provinsi Aceh. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) menurut lapangan usaha Kab/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
2. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020, bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
3. Data realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020, bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
4. Data realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020, bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan bagian wilayah yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua kabupaten/kota di provinsi Aceh dan jumlah sampel dalam penelitian ini dari tahun 2016 sampai 2020 dengan rentang waktu 5 tahun.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Klasifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Dalam penelitian variabel terikat yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan klasifikasi dari variabel yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya akan diuraikan beberapa definisi operasional dari dua variabel diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No.	Variabel	Pengertian	Satuan Data	Sumber Data
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output agregat atau pendapatan rill. Dimana, kedua peningkatan tersebut sering dihitung pendapatan perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input (Suhardi, 2018).	Miliar Rupiah	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rarung, 2016).	Miliar Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tabel 3.1- Lanjutan

3.	Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana alokasi umum merupakan komponen belanja pada APBN menjadi sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonomi baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia setiap tahunnya yang di transfer sebagai dana pembangunan (Talangamin, Kindagen dan Koleangan, 2018).	Miliar Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
4.	Dana Alokasi Khusus (X_3)	Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai segala aktivitas /kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Mokorowu, Rotinsulu dan Engka (2020)	Miliar Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Sumber: Data Diolah, (2021)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data-data yang diuji dengan metode regresi data panel yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Basuki (2017) menyatakan persamaan data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (3.1)$$

Persamaan tersebut diubah sebagai model estimasi data panel, yaitu:

$$\ln PE_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh

\ln = Logaritma Natural

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum di Kab/Kota i tahun t

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus di Kab/Kota i tahun t

i = *Cross Section* (Kab/Kota)

t = *Time Series* (Tahun)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

e = *error term*

3.5.2 Estimasi Model Regresi Panel

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini dikenal dengan *Common Effect*, yakni pendekatan model panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan

data *time series* dan *cross section*. Selanjutnya, pendekatan ini mengestimasi data panel dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. *Common Effect Model (CEM)* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\ln PE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + e_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan:

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh

\ln = Logaritma Natural

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum di Kab/Kota i tahun t

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus di Kab/Kota i tahun t

i = *Cross Section* (Kab/Kota)

t = *Time Series* (Tahun)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

e = *error term*

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa besaran konstanta dipengaruhi oleh perbedaan intersepnya. Pada pendekatan model ini menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Persamaan *Fixed Effect Model (FEM)* adalah sebagai berikut:

$$\ln PE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + e_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan:

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh

\ln = Logaritma Natural

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum di Kab/Kota i tahun t

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus di Kab/Kota i tahun t

i = *Cross Section* (Kab/Kota)

t = *Time Series* (Tahun)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

e = *error term*

3. *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan *Random Effect Model* (REM) dapat mengestimasi masalah yang ditimbulkan variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini berasumsi adanya perbedaan konstanta dan koefisien regresi akibat adanya error/residual yang memiliki hubungan antar objek dan waktu. Model yang dipakai dalam pendekatan ini adalah *Generalized Least Square* (GLS). Persamaan *Random Effect Model* (REM) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln PE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + e_{it} \quad (3.5)$$

Keterangan:

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh

\ln = Logaritma Natural

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum di Kab/Kota i tahun t

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus di Kab/Kota i tahun t

i = *Cross Section* (Kab/Kota)

t = *Time Series* (Tahun)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

e = *error term*

3.5.3 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model secara statistik dapat dilakukan agar dugaan yang diperoleh dapat menjadi efisien. Terdapat beberapa pengujian dalam menentukan model yang akan digunakan dalam pengolahan data panel yaitu uji chow (*Chow Test*), uji hausman (*Hausman Test*), dan uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

1. *Chow Test*

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara Model *Common Effect* dan Model *Fixed Effect*. Diasumsikan bahwa setiap unit *cross section* memiliki tindakan yang sama, tetapi cenderung tidak realitis karena dikemungkinannya setiap unit dari *cross section* memiliki tindakan yang berbeda sehingga menjadi dasar dari uji chow. Dalam pengujian ini yaitu dengan melihat p-value, dengan hipotesis:

H_0 : *Common Effect*, apabila p-value > 0.05

H_1 : *Fixed Effect*, apabila p-value < 0.05

2. *Hausman Test*

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara Model *Random Effect* dan Model *Fixed Effect* dengan menggunakan hipotesis:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Effect Model*

Dasar penolakan dengan menggunakan pertimbangan probabilitas dari *cross-section random*. Jika Prob. *Cross-section Random* lebih besar dari 0.05 (5 persen), maka model *random effect* terpilih. Namun apabila Prob *Cross-section Random* lebih kecil dari 0.05 (5 persen), maka model *fixed effect* terpilih.

3. *Lagrange Multiplier Test*

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara Model *Random Effect* dan Model *Common Effect* dengan menggunakan hipotesis:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Dasar penolakan dengan menggunakan pertimbangan *cross section* Breusch-Pagan. Jika *cross section* Breusch-Pagan lebih besar dari 0.05, maka model *common effect* terpilih. Namun, apabila *cross section* Breusch-Pagan lebih kecil dari 0.05, maka model *random effect* terpilih.

3.6 Uji Signifikansi (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Suatu

variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai probabilitas di setiap variabel lebih kecil dari konstanta ($\text{Prob.} < 0.05$). Untuk mengetahui hasil dari uji t, digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Masing-masing Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, diterima apabila $\text{Prob.} > 0.05$

H_1 : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, diterima apabila $\text{Prob.} < 0.05$

3.7 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari uji f, digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, diterima apabila $\text{Prob.} > 0.05$

H_1 : Semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, diterima apabila $\text{Prob.} > 0.05$.

3.8 Estimasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya persentase variasi seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen, dimana sisanya dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model (Ekananda, 2015). Besarnya koefisien determinasi berkisar nol sampai dengan satu. Dimana, semakin mendekati satu maka semakin dekat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aceh merupakan salah satu Daerah Istimewa yang terletak di ujung laut Pulau Sumatera dan provinsi paling barat di Indonesia, dengan luas daerah mencapai 57.956 km² dan luas wilayah berkisar 3,02 persen dari luas negara Indonesia. Pada tahun 2018 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan dan 6.514 Gampong atau Desa.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Aceh (2020) jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah 5.274.871 jiwa. Maka, dalam penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berdasarkan 23 Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel untuk penelitian dalam populasi wilayah Provinsi Aceh:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Simeulue	92.87
2	Aceh Singkil	126.51
3	Aceh Selatan	232.41
4	Aceh Tenggara	220.86
5	Aceh Timur	422.40
6	Aceh Tengah	215.58
7	Aceh Barat	198.74
8	Aceh Besar	405.54
9	Pidie	435.28
10	Bireuen	436.42
11	Aceh Utara	602.79
12	Aceh Barat Daya	150.78
13	Gayo Luwes	99.53
14	Aceh Tamiang	294.36

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
15	Nagan Raya	168.39
16	Aceh Jaya	93.16
17	Bener Meriah	161.34
18	Pidie Jaya	158.40
19	Banda Aceh	252.90
20	Sabang	41.20
21	Langsa	185.97
22	Lhokseumawe	188.71
23	Subulussalam	90.75
Aceh		5.274.871

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas akan diuraikan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh untuk diteliti hasilnya apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4.2 Dekripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
PDRB (ADHK), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh
Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)

No	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
1	2016	116.374.299,89	2.060.180,94	1.263.870,98	129.982,37
2	2017	121.240.978,72	2.276.305,56	2.060.263,23	1.489.203,02
3	2018	126.824.365,24	2.359.385,39	2.060.263,23	1.483.635,79
4	2019	132.074.250,80	2.698.912,47	2.322.266,50	1.744.873,15
5	2020	131.585.017,16	2.570.775,87	1.956.492,79	1.762.270,40

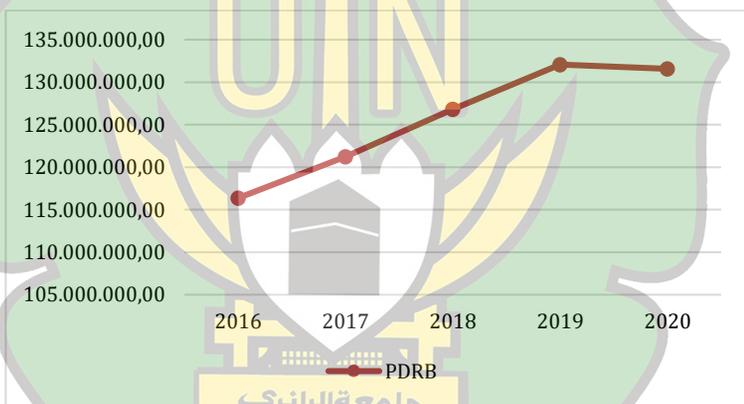
Sumber: DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama rentang waktu 4 tahun terakhir tingkat produk domestik regional bruto di Provinsi Aceh mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 PDRB mencapai Rp 132.074.250,80 (miliar rupiah) meningkat dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 131.585.017,16 (miliar rupiah). Pendapatan asli daerah juga mengalami hal yang sama dimana tahun 2019 sebesar Rp 2.698.912,47 (miliar rupiah) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi pada 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 2.570.775,87 (miliar rupiah). Dana alokasi umum mengalami naik turun dimana yang paling tinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp 2.322.266,50 (miliar rupiah). Serta dana alokasi khusus pun juga mengalami naik turun dimana yang paling rendah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 129.982,37 (miliar rupiah).

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah, dimana pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output secara agregat selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat kenaikan penggunaan input. Berikut data pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir:

Gambar 4.2 Grafik PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)



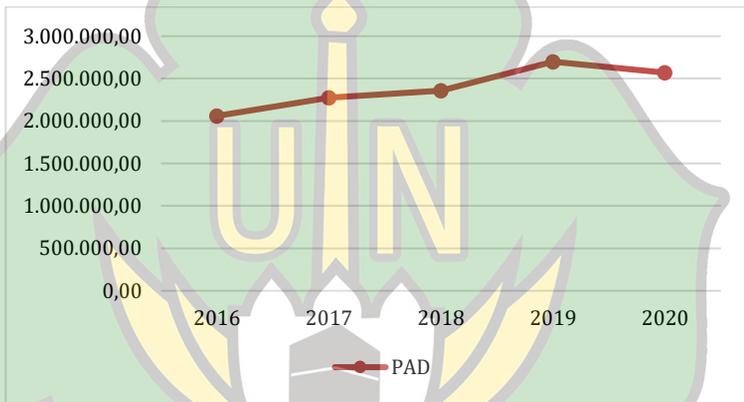
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah (2021)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah PDRB (ADHK) yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp 132.074.250,80 (miliar rupiah) namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 131.585.017,16 (miliar rupiah), dimana kondisi tersebut disebabkan karena adanya laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah berdasarkan sumber-sumber dari daerah sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir:

Gambar 4.3 Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)



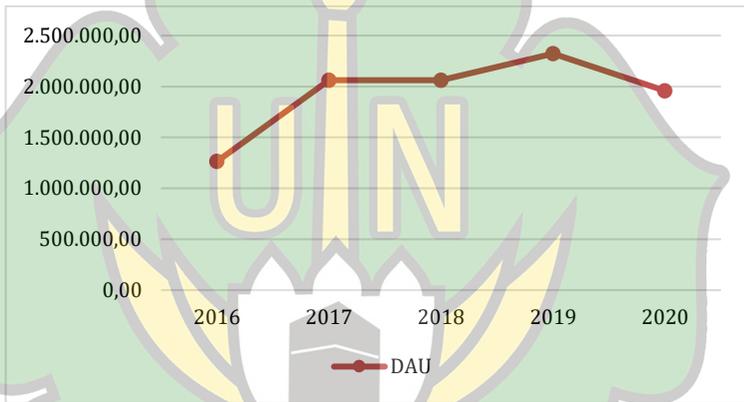
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diolah (2021)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah selama 4 tahun terakhir (dari 2016-2019) cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD sebesar Rp 2.570.775,87 (miliar rupiah). Sumber pendapatan daerah Aceh melalui Pendapatan Asli Daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana, pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah terbesar di Provinsi Aceh.

4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang di transfer pemerintah kepada setiap daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk pemerataan pembangunan. Berikut adalah data Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir:

Gambar 4.4 Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)



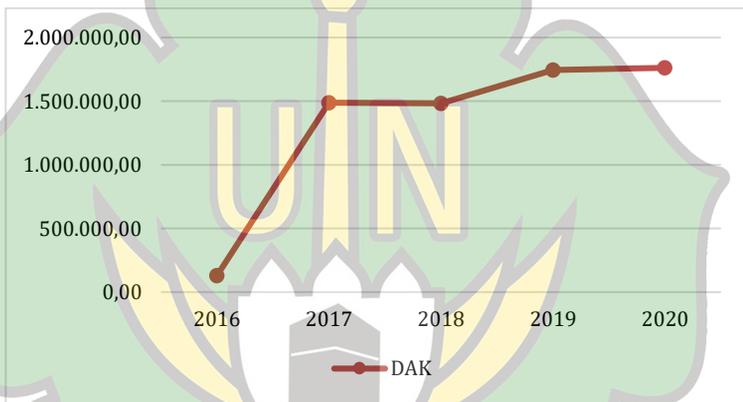
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diolah (2021)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah Dana Alokasi Umum mengalami naik turun selama 5 tahun terakhir hanya periode 2016-2019 yang mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.956.492,79 (miliar rupiah). Hal ini terjadi akibat penurunan pada pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah disebabkan adanya *recofusing* anggaran dari segi alokasi dan diperuntukkan pada DAU yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19.

4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai segala aktivitas khusus yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah data Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir:

Gambar 4.5 Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diolah (2021)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun hanya di tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Dana alokasi khusus pada tahun 2016 sebesar Rp 129.982,37 (miliar rupiah), selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang jauh dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.489.203,02 (miliar rupiah), tahun 2018 menurun sebesar Rp 1.483.635,79 (miliar rupiah), hingga tahun 2020 dana alokasi khusus mencapai Rp 1.762.270,40 (miliar

rupiah). Biasanya dana alokasi khusus digunakan untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh. Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yang akan digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan dengan melakukan uji chow (*Chow Test*), uji hausman (*Hausman Test*), dan uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

4.3.1 Chow Test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji F *Restricted* dengan membandingkan nilai *cross-section* F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*, diterima apabila *cross-section* $F > 0.05$

H_1 : *Fixed Effect Model*, diterima apabila *cross-section* $F < 0.05$

Hasil *Chow Test* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	247.674627	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	475.033233	22	0.0000

Sumber: Data Diolah dengan E-Views (2022)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil dari *Chow Test* dimana nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

4.3.2 Hausman Test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Maka digunakan uji dengan nilai *cross-section* random. Pengujian dilakukan dengan hipotesis:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas *cross-section random* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b) Jika nilai probabilitas *cross-section random* $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil *Hausman Test* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	75.361008	3	0.0000

Sumber: Data Diolah dengan *E-Views* (2022)

Tabel 4.4 menunjukkan hasil dari *Hausman Test* dengan memperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

4.4 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Pada estimasi regresi data panel, model terbaik yang diperoleh yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil pengolahan data menggunakan FEM pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Estimasi Data Panel Metode Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.03941	2.752698	6.190077	0.0000
LN_PAD	0.122609	0.035135	3.489637	0.0008
LN_DAU	-0.143517	0.138219	-1.038330	0.3019
LN_DAK	-0.062556	0.020886	-2.995185	0.0036

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.996564	Mean dependent var	15.23365
Adjusted R-squared	0.995598	S.D. dependent var	0.759850
S.E. of regression	0.050413	Akaike info criterion	-2.941276
Sum squared resid	0.226187	Schwarz criterion	-2.320683
Log likelihood	195.1234	Hannan-Quinn criter.	-2.689380
F-statistic	1032.401	Durbin-Watson stat	0.936262
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah dengan E-Views (2022)

Model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$PE = 17.03941 + 0.122609LN_{PAD} - 0.143517LN_{DAU} - 0.062556LN_{DAK} + \varepsilon.$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, apabila selama periode 2016 s/d 2020 pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

diasumsikan tetap, maka Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh selama periode penelitian tersebut akan meningkat sebesar 17,03941%.

Kedua, nilai koefisien dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,122609 artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh sebesar 0,122609% dengan asumsi variabel lain tetap. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh Periode 2016 s/d 2020.

Ketiga, nilai koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,143517 yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan dana alokasi umum sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh sebesar 0,143517% dengan asumsi variabel lain tetap. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020.

Keempat, nilai koefisien dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,062556 artinya apabila ada kenaikan dana alokasi khusus sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh sebesar 0,062556% dengan asumsi variabel lain tetap. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020.

4.5 Uji Signifikansi (Uji T)

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah (X_1) sebesar 17,03941 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0008 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Dana Alokasi Umum (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar -0,143517 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3019 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

Variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar -0,062556 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0036 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020. Nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

4.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan biasanya digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-statistik dari $\alpha = 0,05$, dimana jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H_0 : Tidak Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic dalam metode *Fixed Effect Model* sebesar 1032,401 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh periode 2016 s/d 2020.

4.7 Estimasi R²

Koefisien determinasi (R²) menunjukkan besarnya persentase variasi seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pada tabel 4.5 dapat diketahui nilai estimasi R² dalam *Fixed Effect Model* sebesar 0,996564 artinya sebesar 99,65% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, sementara sisanya sebesar 0,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dimana pendapatan tersebut dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan asli daerah sebagai pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Biasanya pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah. Namun, adanya perbedaan dalam potensi daerah dapat menyebabkan ketimpangan fiskal dimana setiap daerah yang memiliki potensi yang lebih akan mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak, sebaliknya apabila daerah memiliki potensi yang kurang maka pendapatan asli daerah yang diterima akan sedikit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh, artinya pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dimana, jika semakin tinggi pendapatan asli daerah yang direalisasikan maka akan semakin tinggi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang diperoleh AR dan Zein (2016) dimana secara parsial pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Dana alokasi umum merupakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini disebabkan karena setiap daerah tidak sama dalam membiayai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dana alokasi umum agar dapat mencengah ketimpangan fiskal. Dana alokasi umum sebagai penerimaan daerah yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan transfer pemerintah lainnya yang dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan di suatu daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, artinya transfer dana alokasi umum yang diberikan pemerintah memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena penerimaan dana alokasi umum untuk daerah tidak digunakan untuk kepentingan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tetapi kemungkinan dana alokasi umum dipakai untuk belanja rutin yang tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana, seharusnya dana alokasi umum dialokasikan untuk belanja pembangunan berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini mendukung Rarung (2016) yang menjelaskan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah belum memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus yang langsung bersentuhan dengan kepentingan umum yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Dana alokasi khusus merupakan transfer pemerintah yang bersifat khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi laju ketimpangan pertumbuhan antar daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin besar jumlah dana alokasi khusus yang diterima pemerintah kab/kota di provinsi Aceh, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana alokasi khusus yang biasanya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi dan kesehatan bisa saja bukan menjadi prioritas pemerintah daerah karena menjadi urusan pemerintah. Misalnya, dana alokasi khusus di beberapa kab/kota yang ada di provinsi Aceh yang mengalami bencana alam berupa banjir, maka dana alokasi khusus akan digunakan untuk menanggulangi banjir tersebut dengan merevitalisasi gorong-gorong. Dimana secara tidak langsung pelaksanaan revitalisasi dapat merusak beberapa infrastruktur yang ada, sehingga hal tersebut yang menyebabkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diperoleh Siswiyanti (2015) yang menjelaskan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima daerah belum tentu tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sementara, secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh dengan menggunakan model regresi data panel berupa *Fixed Effect Model* (FEM), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh, dimana apabila terjadi kenaikan satu miliar rupiah pendapatan asli daerah maka akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh sebesar 12,26%. Artinya, semakin meningkatnya variabel pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memberikan pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Kondisi ini terjadi karena dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah ke daerah belum dapat direalisasikan dengan baik untuk belanja pembangunan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin pegawai sehingga tidak mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh, dimana apabila terjadi kenaikan satu miliar rupiah dana alokasi khusus akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%.
4. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh. Nilai estimasi R^2 sebesar 0,996564 artinya sebesar 99,65% variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar 0,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

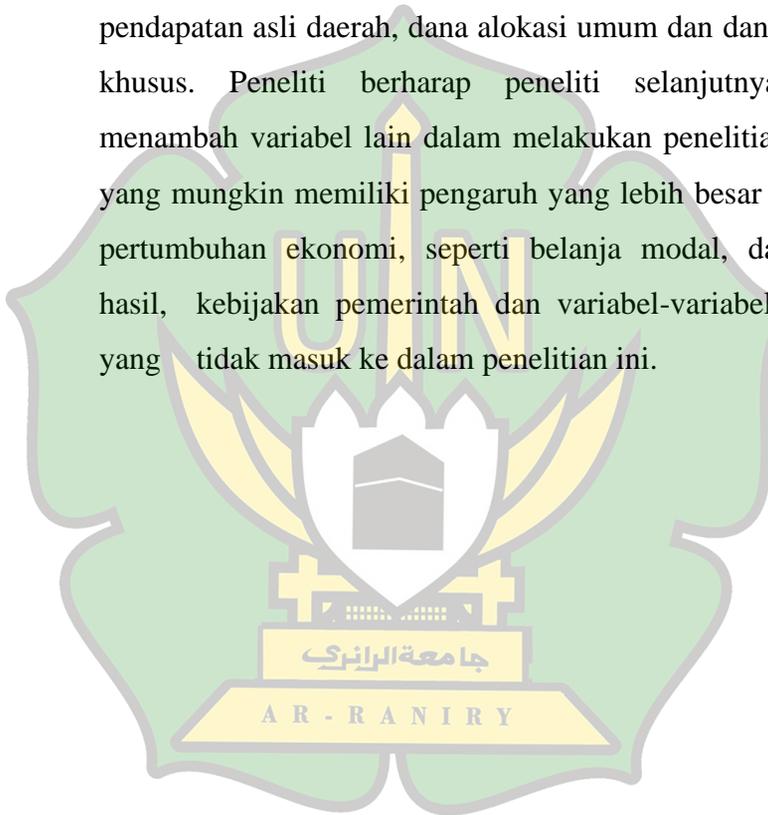
5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dapat merealisasikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di daerahnya masing-masing

dengan baik, agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil dan kesejahteraan masyarakat Aceh lebih terjamin.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti belanja modal, dana bagi hasil, kebijakan pemerintah dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Teori - Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- AR, Rahmah dan Zein, Basri. (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA)*. Vol. 1 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). *Aceh Dalam Angka 2021*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.
- _____. (2021). *PDRB Aceh Tahun 2016 – 2020*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Basuki, Agus. T., dan Prawoto, Nano. 2017. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Ni, W.R., dan Suputra, IDGD. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya*. Bali, Indonesia. Vol. 18 No. 3
- Dinas Kesehatan Aceh. (2016). *Profil Kesehatan Aceh Tahun 2016*. Aceh: Dinas Kesehatan Aceh.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2020). *Realisasi APBD Tahun 2016 – 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hardani, Auliya, N.H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Sukmana, D.J., & Istiqomah, R.R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

- Kemenko Perekonomian. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2021 Menembus Zona Ekspansif*. Diambil pada 27, November 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif>.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kusumawati, Lily dan Wiksuana, I.G.B. (2018). “Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 7. No. 5.
- Mokoworo, Lian, A., Rotinsulu, Debby, Ch., dan Engka, Daisy, S.M. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 21 No. 04.
- Putri, Zuwesty, E. (2015). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5 No. 2.
- Rarung, Patric. (2016). “Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 03.
- Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 104. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- _____. (2004). Undang-Undang No. 33 Jakarta: Kementerian Keuangan.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- _____. (2009). Undang-Undang No. 28 Jakarta: Kementerian Keuangan.

- _____. (2014). Undang-Undang No. 22 Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siswiyanti, Pungky. (2015). “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Akutansi*. Vol. 7. No.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, Dayu. (2018). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syahputra, R. (2017). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol. 1. No. 2.
- Talangamin, Olvy, B., Kindagen, Paulus, dan Koleangan, Rosalina, A.M (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19. No. 7.
- Widjaja, H.A.W. 2015. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lampiran 1

Data PDRB (ADHK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Aceh Selatan	2016	3.740.292,79	125.989,16	649.570,78	315.369,15
2	Kab. Aceh Selatan	2017	3.887.220,20	140.875,26	638.159,91	296.838,06
3	Kab. Aceh Selatan	2018	4.063.405,16	152.071,79	634.654,63	315.285,37
4	Kab. Aceh Selatan	2019	4.243.395,93	139.976,61	653.415,19	264.913,50
5	Kab. Aceh Selatan	2020	4.241.408,48	134.381,48	603.242,25	197.760,19
6	Kab. Pidie	2016	6.849.960,14	249.489,45	809.163,28	306.540,42
7	Kab. Pidie	2017	7.152.962,37	267.608,10	794.948,89	256.550,73
8	Kab. Pidie	2018	7.450.405,47	237.201,95	788.324,31	293.595,82
9	Kab. Pidie	2019	7.780.357,55	243.230,77	803.505,13	249.773,75
10	Kab. Pidie	2020	7.769.640,81	214.947,83	836.281,10	236.046,07
11	Kab. Simeulue	2016	1.405.844,50	48.646,14	439.543,81	159.484,18
12	Kab. Simeulue	2017	1.467.978,72	61.095,18	436.068,87	150.801,80
13	Kab. Simeulue	2018	1.530.152,91	63.146,02	444.554,70	132.388,79
14	Kab. Simeulue	2019	1.600.520,74	79.466,32	465.338,36	148.119,46

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
15	Kab. Simeulue	2020	1.602.911,10	96.837,49	422.324,53	74.894,76
16	Kota Langsa	2016	3.390.389,66	121.369,46	451.951,92	187.184,33
17	Kota Langsa	2017	3.540.718,30	120.138,95	444.012,58	211.722,42
18	Kota Langsa	2018	3.694.086,90	121.316,71	444.012,58	131.946,20
19	Kota Langsa	2019	3.856.219,21	115.244,24	456.700,56	146.296,43
20	Kota Langsa	2020	3.815.194,93	126.277,86	414.459,53	92.428,56
21	Kab. Aceh Barat Daya	2016	2.623.750,51	80.496,80	459.078,72	263.260,13
22	Kab. Aceh Barat Daya	2017	2.740.778,26	91.571,49	451.014,18	150.070,17
23	Kab. Aceh Barat Daya	2018	2.867.190,99	83.468,42	451.309,79	192.663,13
24	Kab. Aceh Barat Daya	2019	3.003.268,21	90.348,94	460.983,80	143.804,48
25	Kab. Aceh Barat Daya	2020	2.987.564,72	111.763,37	415.850,39	107.986,65
26	Kab. Aceh Barat	2016	5.310.703,14	140.614,47	580.525,04	150.057,20
27	Kab. Aceh Barat	2017	6.013.220,83	161.742,85	570.327,08	175.556,43
28	Kab. Aceh Barat	2018	6.622.956,31	150.499,04	570.763,54	180.969,63
29	Kab. Aceh Barat	2019	6.953.360,87	153.799,29	588.209,48	185.814,62
30	Kab. Aceh Barat	2020	7.083.150,87	149.925,45	553.850,56	153.998,62
31	Kab. Aceh Besar	2016	8.858.439,61	135.284,49	720.668,45	315.141,28
32	Kab. Aceh Besar	2017	9.213.402,42	145.464,46	708.008,63	214.075,59

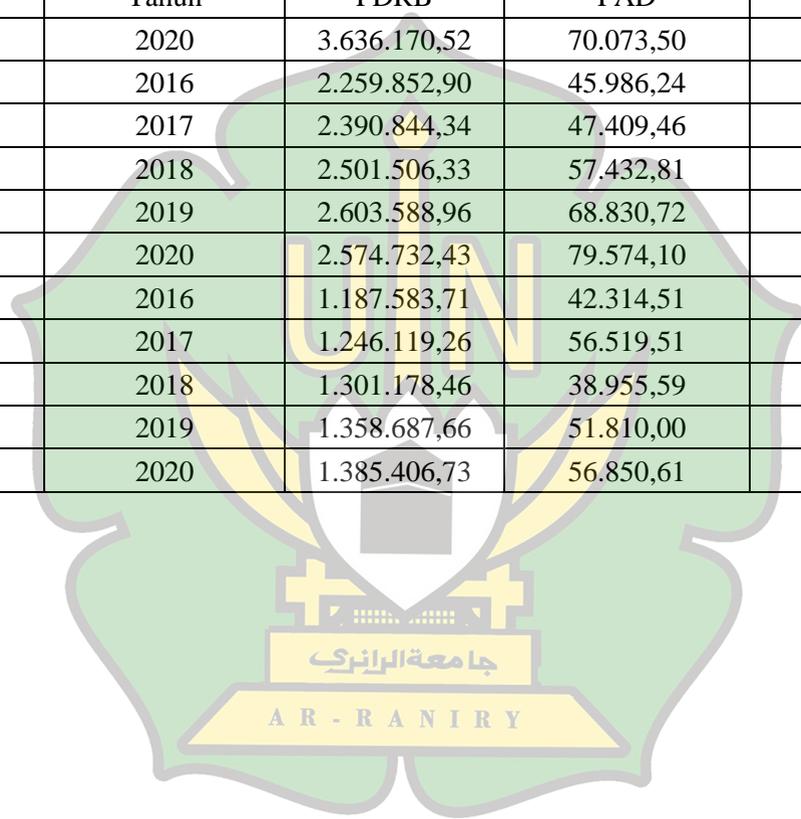
No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
33	Kab. Aceh Besar	2018	9.561.638,20	159.480,16	713.344,62	198.391,15
34	Kab. Aceh Besar	2019	9.977.735,25	169.896,99	751.399,71	244.970,92
35	Kab. Aceh Besar	2020	10.008.806,57	188.775,26	759.179,35	211.898,41
36	Kab. Aceh Singkil	2016	1.540.654,21	42.057,16	436.600,10	192.988,10
37	Kab. Aceh Singkil	2017	1.600.982,80	43.441,12	429.417,58	140.824,18
38	Kab. Aceh Singkil	2018	1.664.740,25	45.289,51	440.493,15	119.272,24
39	Kab. Aceh Singkil	2019	1.731.165,27	45.264,58	454.078,75	113.317,18
40	Kab. Aceh Singkil	2020	1.711.084,18	46.166,27	409.538,54	126.487,38
41	Kab. Aceh Tengah	2016	5.200.044,33	156.130,10	613.313,52	382.808,76
42	Kab. Aceh Tengah	2017	5.410.437,38	163.000,73	602.539,57	257.914,16
43	Kab. Aceh Tengah	2018	5.638.960,01	150.818,71	603.737,49	210.625,43
44	Kab. Aceh Tengah	2019	5.836.845,00	170.961,16	623.701,92	184.505,40
45	Kab. Aceh Tengah	2020	5.766.448,10	193.589,82	572.047,24	170.324,49
46	Kab. Aceh Tenggara	2016	3.044.879,93	61.457,04	594.675,37	344.073,21
47	Kab. Aceh Tenggara	2017	3.197.952,08	60.053,23	584.228,84	191.164,13
48	Kab. Aceh Tenggara	2018	3.302.242,16	80.263,47	580.439,18	151.157,75
49	Kab. Aceh Tenggara	2019	3.442.064,32	117.628,92	602.160,37	172.052,51
50	Kab. Aceh Tenggara	2020	3.436.343,94	98.346,79	500.496,92	235.494,96

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
51	Kab. Aceh Timur	2016	7.175.794,70	94.345,44	784.102,68	205.137,66
52	Kab. Aceh Timur	2017	7.487.534,96	152.401,17	777.993,39	199.824,39
53	Kab. Aceh Timur	2018	7.802.174,64	169.455,86	785.902,55	192.612,25
54	Kab. Aceh Timur	2019	8.146.902,30	185.148,02	819.436,04	238.991,64
55	Kab. Aceh Timur	2020	8.292.591,42	198.202,80	769.038,91	180.804,75
56	Kab. Aceh Utara	2016	15.195.569,01	388.251,80	1.021.636,68	275.015,67
57	Kab. Aceh Utara	2017	15.544.942,83	202.091,56	837.370,11	273.832,21
58	Kab. Aceh Utara	2018	16.286.459,23	231.848,85	835.915,56	368.966,29
59	Kab. Aceh Utara	2019	16.852.696,94	279.567,72	893.015,39	444.119,79
60	Kab. Aceh Utara	2020	17.015.452,78	226.828,86	897.980,13	375.269,15
61	Kab. Bireuen	2016	8.824.935,88	186.162,57	816.856,41	278.901,19
62	Kab. Bireuen	2017	9.197.930,54	192.939,85	802.506,87	328.426,61
63	Kab. Bireuen	2018	9.586.141,56	179.476,24	781.884,22	265.371,92
64	Kab. Bireuen	2019	10.065.327,74	156.528,83	817.988,85	275.164,67
65	Kab. Bireuen	2020	9.970.576,95	162.162,62	815.284,27	214.635,56
66	Kota Banda Aceh	2016	13.480.000,00	258.591,40	602.292,10	168.636,09
67	Kota Banda Aceh	2017	13.973.000,00	270.170,80	591.711,77	105.782,66
68	Kota Banda Aceh	2018	14.557.000,00	246.272,15	591.711,77	116.595,70

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
69	Kota Banda Aceh	2019	15.165.000,00	235.123,07	605.014,83	111.593,86
70	Kota Banda Aceh	2020	14.666.000,00	227.747,62	547.629,39	123.927,63
71	Kota Sabang	2016	957.293,60	47.776,63	353.813,48	132.841,13
72	Kota Sabang	2017	1.015.380,21	55.081,05	348.745,22	71.005,37
73	Kota Sabang	2018	1.075.029,71	57.188,07	350.863,35	127.162,93
74	Kota Sabang	2019	1.137.556,92	59.329,69	370.143,34	99.666,77
75	Kota Sabang	2020	1.124.425,92	62.412,22	338.311,72	70.815,30
76	Kota Lhokseumawe	2016	6.450.408,23	56.348,63	467.846,59	177.543,38
77	Kota Lhokseumawe	2017	6.591.663,19	62.986,26	459.628,03	135.319,88
78	Kota Lhokseumawe	2018	6.840.710,70	65.618,96	459.628,03	93.948,85
79	Kota Lhokseumawe	2019	7.112.684,80	61.442,55	469.471,44	103.034,97
80	Kota Lhokseumawe	2020	7.009.713,29	65.875,90	425.306,24	81.627,89
81	Kab. Gayo Lues	2016	1.788.140,34	46.277,34	466.817,08	219.874,84
82	Kab. Gayo Lues	2017	1.872.227,20	60.321,45	462.943,02	89.868,24
83	Kab. Gayo Lues	2018	1.896.150,44	48.758,46	462.943,02	169.968,14
84	Kab. Gayo Lues	2019	1.920.005,24	51.415,80	472.230,87	100.293,48
85	Kab. Gayo Lues	2020	1.936.869,01	58.402,72	423.662,73	99.673,44
86	Kab. Aceh Jaya	2016	1.777.001,91	45.774,37	422.268,33	217.860,07

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
87	Kab. Aceh Jaya	2017	1.848.146,47	52.599,50	418.435,86	132.370,91
88	Kab. Aceh Jaya	2018	1.922.740,62	58.624,90	421.315,26	150.114,01
89	Kab. Aceh Jaya	2019	1.994.914,40	72.776,85	437.094,04	112.724,65
90	Kab. Aceh Jaya	2020	1.982.449,42	79.460,10	397.557,69	84.857,49
91	Kab. Nagan Raya	2016	5.641.779,01	104.202,91	515.602,31	116.001,49
92	Kab. Nagan Raya	2017	5.864.576,48	74.051,05	506.544,84	53.771,92
93	Kab. Nagan Raya	2018	6.116.408,73	97.118,51	501.612,94	146.257,94
94	Kab. Nagan Raya	2019	6.530.496,72	87.625,37	514.300,66	142.074,13
95	Kab. Nagan Raya	2020	6.761.947,06	109.062,63	485.041,97	135.970,79
96	Kab. Aceh Tamiang	2016	5.279.640,30	114.051,09	542.165,80	247.089,94
97	Kab. Aceh Tamiang	2017	5.491.009,34	116.246,21	532.641,69	136.356,84
98	Kab. Aceh Tamiang	2018	5.724.227,89	139.261,84	532.641,69	163.435,94
99	Kab. Aceh Tamiang	2019	5.984.418,53	128.905,94	547.975,35	144.139,92
100	Kab. Aceh Tamiang	2020	6.009.374,16	125.638,09	493.792,58	115.154,69
101	Kab. Bener Meriah	2016	3.206.521,50	66.454,05	456.974,42	173.933,53
102	Kab. Bener Meriah	2017	3.337.605,70	82.038,40	448.946,85	105.793,22
103	Kab. Bener Meriah	2018	3.476.510,30	67.961,54	448.988,54	117.744,59
104	Kab. Bener Meriah	2019	3.626.654,52	86.415,54	458.759,08	138.907,34

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK
105	Kab. Bener Meriah	2020	3.636.170,52	70.073,50	424.584,26	131.117,80
106	Kab. Pidie Jaya	2016	2.259.852,90	45.986,24	427.787,22	235.696,46
107	Kab. Pidie Jaya	2017	2.390.844,34	47.409,46	420.521,36	157.595,58
108	Kab. Pidie Jaya	2018	2.501.506,33	57.432,81	420.639,47	177.314,38
109	Kab. Pidie Jaya	2019	2.603.588,96	68.830,72	441.952,25	155.507,81
110	Kab. Pidie Jaya	2020	2.574.732,43	79.574,10	410.145,46	120.157,18
111	Kota Subulussalam	2016	1.187.583,71	42.314,51	346.538,21	189.106,73
112	Kota Subulussalam	2017	1.246.119,26	56.519,51	343.605,01	136.370,08
113	Kota Subulussalam	2018	1.301.178,46	38.955,59	345.246,78	74.571,11
114	Kota Subulussalam	2019	1.358.687,66	51.810,00	353.735,07	93.264,88
115	Kota Subulussalam	2020	1.385.406,73	56.850,61	318.039,40	60.439,66



Lampiran 2

Data ln PDRB (ADHK), ln Pendapatan Asli Daerah (PAD), ln Dana Alokasi Umum (DAU), dan ln Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
1	Kab. Aceh Selatan	2016	15.13467445242278	18.65170647606008	20.29182237197034	19.56925443199118
2	Kab. Aceh Selatan	2017	15.17320485860283	18.76338543151141	20.2740994603717	19.5086973219829
3	Kab. Aceh Selatan	2018	15.21753188941736	18.83986330663554	20.26859152590683	19.56898875407769
4	Kab. Aceh Selatan	2019	15.26087443352415	18.75698590425997	20.29772331409986	19.39491392836778
5	Kab. Aceh Selatan	2020	15.26040596072494	18.71619319315258	20.21782942359711	19.10256573031158
6	Kab. Pidie	2016	15.73975339124338	19.33492720308413	20.51151129519959	19.54086018115457
7	Kab. Pidie	2017	15.78303714634692	19.40503415866746	20.49378838375967	19.36283698660525
8	Kab. Pidie	2018	15.82377901437808	19.28442247973337	20.48542013408915	19.49771463927662
9	Kab. Pidie	2019	15.86711285268211	19.30952124112794	20.50449412990427	19.33606607171189
10	Kab. Pidie	2020	15.86573449347607	19.1859059101834	20.5444753693127	19.2795375688936
11	Kab. Simeulue	2016	14.15614874779686	17.70008305677098	19.9012479584031	18.88745529602294
12	Kab. Simeulue	2017	14.19939699213873	17.92794359697613	19.89331076360725	18.83147698156996
13	Kab. Simeulue	2018	14.2408782295513	17.96096041047726	19.91258367621178	18.70125354697775
14	Kab. Simeulue	2019	14.28583959675858	18.1908439309044	19.95827537419317	18.81352968363583
15	Kab. Simeulue	2020	14.28733197153853	18.38854484387195	19.86128462619608	18.13159450919262

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
16	Kota Langsa	2016	15.03645541670388	18.61434990059141	19.92908637815822	19.04760443901926
17	Kota Langsa	2017	15.07984017413111	18.60415959773642	19.91136346684158	19.170786650666
18	Kota Langsa	2018	15.12224396409917	18.61391514941868	19.91136346684158	18.69790484035546
19	Kota Langsa	2019	15.16519778216312	18.56256431850822	19.93953850653196	18.80114550520149
20	Kota Langsa	2020	15.15450231707032	18.65399533815709	19.8424859017184	18.34194668762933
21	Kab. Aceh Barat Daya	2016	14.78011534449524	18.20372800147491	19.94473226312262	19.38865321156096
22	Kab. Aceh Barat Daya	2017	14.82375247452988	18.33263058940191	19.92700935151772	18.82661360677957
23	Kab. Aceh Barat Daya	2018	14.86884335931919	18.23997898909064	19.92766456631225	19.07645378887286
24	Kab. Aceh Barat Daya	2019	14.91521165699652	18.31918984576936	19.94887347236128	18.78396522126185
25	Kab. Aceh Barat Daya	2020	14.90996913858558	18.53189451529748	19.84583612854496	18.49751822736296
26	Kab. Aceh Barat	2016	15.48523480253072	18.76153251624886	20.17944350029049	18.82652715348923
27	Kab. Aceh Barat	2017	15.60947107477558	18.90151833976784	20.16172058930019	18.98347111037706
28	Kab. Aceh Barat	2018	15.70605240073692	18.82946732472461	20.16248557327221	19.01383982797665
29	Kab. Aceh Barat	2019	15.75473567907188	18.85115900819816	20.19259370602153	19.04026007882556
30	Kab. Aceh Barat	2020	15.7732294048054	18.82564877480477	20.13240547366958	18.85245424384464
31	Kab. Aceh Besar	2016	15.99688119081815	18.72289048820013	20.39568975315365	19.56853163460759
32	Kab. Aceh Besar	2017	16.03616976672034	18.7954424117981	20.37796684226165	19.18183976962354
33	Kab. Aceh Besar	2018	16.0732696301798	18.88743010336379	20.38547521223342	19.10575116719411
34	Kab. Aceh Besar	2019	16.11586669367768	18.95070292715722	20.43744831048123	19.31665010130506

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
35	Kab. Aceh Besar	2020	16.11897592040746	19.0560677868317	20.44774860652341	19.17161755147867
36	Kab. Aceh Singkil	2016	14.24771769587118	17.55454021573642	19.89452823799397	19.07813910963284
37	Kab. Aceh Singkil	2017	14.28612824863569	17.58691724245982	19.87794039739101	18.76302278416288
38	Kab. Aceh Singkil	2018	14.32517966322047	17.62858610957975	19.90340547227779	18.59691920794681
39	Kab. Aceh Singkil	2019	14.36430530620387	17.6280355723948	19.93378119911328	18.54570137584039
40	Kab. Aceh Singkil	2020	14.35263775096274	17.64776009098848	19.830541571603	18.65565317713144
41	Kab. Aceh Tengah	2016	15.46417770851532	18.8662002105196	20.23438681502957	19.763046103044
42	Kab. Aceh Tengah	2017	15.50384049413516	18.90926529501842	20.2166639041596	19.36813739039814
43	Kab. Aceh Tengah	2018	15.54521021108125	18.8315890799132	20.21865005050123	19.16559192463553
44	Kab. Aceh Tengah	2019	15.57970096909632	18.95694699856111	20.25118313272133	19.0331893273569
45	Kab. Aceh Tengah	2020	15.56756686834751	19.08125219836899	20.16473214733137	18.95321598320324
46	Kab. Aceh Tenggara	2016	14.92897202649318	17.93384899033912	20.20352622806878	19.65636504100264
47	Kab. Aceh Tenggara	2017	14.97802118789854	17.91074196382428	20.18580331677799	19.06864298288366
48	Kab. Aceh Tenggara	2018	15.01011223814445	18.2008252344741	20.17929558245055	18.83383456613124
49	Kab. Aceh Tenggara	2019	15.05158194238902	18.58304551854388	20.21603437809118	18.96331031904583
50	Kab. Aceh Tenggara	2020	15.04991865602899	18.40401047806788	20.03111201084652	19.27720010698871
51	Kab. Aceh Timur	2016	15.78622407305845	18.36247353640287	20.4800505480541	19.13919186366379
52	Kab. Aceh Timur	2017	15.82875019051013	18.8420268972502	20.47222858724797	19.11294950651617
53	Kab. Aceh Timur	2018	15.86991305280232	18.94810306238223	20.48234336125676	19.07618970628916

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
54	Kab. Aceh Timur	2019	15.91314832707653	19.03666618219905	20.5241269152751	19.29193916677482
55	Kab. Aceh Timur	2020	15.93087307416223	19.10480131987119	20.4606521334716	19.01292831033303
56	Kab. Aceh Utara	2016	16.53651443081848	19.77716465866873	20.74467177351	19.43233864160711
57	Kab. Aceh Utara	2017	16.55924592375835	19.12423144993453	20.54577672665181	19.42802613920587
58	Kab. Aceh Utara	2018	16.6058445984503	19.26159623853296	20.54403817285074	19.726215866262
59	Kab. Aceh Utara	2019	16.64002125774143	19.44875511151599	20.61011437729242	19.91160488625867
60	Kab. Aceh Utara	2020	16.64963247620076	19.23970638715241	20.61565850575456	19.74315406464383
61	Kab. Bireuen	2016	15.99309189503486	19.04213091307875	20.52097389441762	19.44636812605578
62	Kab. Bireuen	2017	16.03448907541183	19.07788908291839	20.50325098240213	19.60982397890887
63	Kab. Bireuen	2018	16.07582902596176	19.00555343830762	20.47721723491444	19.39664288719042
64	Kab. Bireuen	2019	16.12460717887065	18.86875079691578	20.52235927050111	19.43288030469564
65	Kab. Bireuen	2020	16.11514900886952	18.90411022740456	20.51904740793543	19.18445210108397
66	Kota Banda Aceh	2016	16.41671766344843	19.37075980511145	20.21625311482334	18.94325364906868
67	Kota Banda Aceh	2017	16.45263745406258	19.41456492939219	20.19853020266619	18.47689718049875
68	Kota Banda Aceh	2018	16.4935825355468	19.32194778515892	20.19853020266619	18.5742230044444
69	Kota Banda Aceh	2019	16.53450069910482	19.27561965484485	20.22076352809138	18.53037659967813
70	Kota Banda Aceh	2020	16.50104244763588	19.24374864548773	20.12110933510923	18.6352083276291
71	Kota Sabang	2016	13.77186541544255	17.6820471887951	19.68428043958597	18.70466448627924
72	Kota Sabang	2017	13.83077369144929	17.8243164229986	19.66985220785211	18.07826615763152

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
73	Kota Sabang	2018	13.8878588563713	17.86185597657767	19.67590741503859	18.66097974391424
74	Kota Sabang	2019	13.94439346811574	17.89862045703145	19.72940090209082	18.41734297098053
75	Kota Sabang	2020	13.93278317004337	17.94927178289029	19.63947829173739	18.07558570846574
76	Kota Lhokseumawe	2016	15.679653978242	17.84706851190847	19.96365101596091	18.9947255585348
77	Kota Lhokseumawe	2017	15.70131625551612	17.95842716691913	19.94592810512439	18.72315208292877
78	Kota Lhokseumawe	2018	15.73840218770991	17.99937533971645	19.94592810512439	18.35826106341912
79	Kota Lhokseumawe	2019	15.77739033950449	17.93361328835203	19.96711803474168	18.45057906272641
80	Kota Lhokseumawe	2020	15.76280735803169	18.00328330059484	19.86832004621995	18.21768156937448
81	Kab. Gayo Lues	2016	14.39668672156831	17.65016317839853	19.9614480493953	19.20856907422244
82	Kab. Gayo Lues	2017	14.4426392961766	17.91519841267256	19.9531145396826	18.31385523560548
83	Kab. Gayo Lues	2018	14.45533630464094	17.70238936351686	19.9531145396826	18.95112160745858
84	Kab. Gayo Lues	2019	14.46783847316691	17.75545614912073	19.97297856590805	18.42361127973471
85	Kab. Gayo Lues	2020	14.47658331490885	17.88287316057726	19.86444825090667	18.41740984167922
86	Kab. Aceh Jaya	2016	14.39043818198146	17.63923497743195	19.86115152774826	19.19936355403043
87	Kab. Aceh Jaya	2017	14.42969378670097	17.77821717709247	19.85203418166885	18.70111847967151
88	Kab. Aceh Jaya	2018	14.46926213247807	17.88667010285297	19.85889196887498	18.82690563308715
89	Kab. Aceh Jaya	2019	14.50611170011739	18.10290852635073	19.89565892899253	18.54045867860726
90	Kab. Aceh Jaya	2020	14.49984371892482	18.19076564826928	19.80085063624172	18.2564838943572
91	Kab. Nagan Raya	2016	15.54571000104247	18.46185068881088	20.06084632281285	18.56911366829753

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
92	Kab. Nagan Raya	2017	15.58444082603864	18.12026533382322	20.04312341080428	17.80026207295354
93	Kab. Nagan Raya	2018	15.6264856734253	18.39144260190084	20.03333935277139	18.80088238420663
94	Kab. Nagan Raya	2019	15.69199356574095	18.2885811857635	20.05831860938323	18.77185954982711
95	Kab. Nagan Raya	2020	15.72682143317466	18.50743287077291	19.99974598742523	18.72795070380713
96	Kab. Aceh Tamiang	2016	15.47936852836183	18.55215708455323	20.11108242221722	19.32526297454192
97	Kab. Aceh Tamiang	2017	15.51862264722478	18.57122102340643	20.09335951029299	18.73078587721645
98	Kab. Aceh Tamiang	2018	15.56021823193374	18.75186647380224	20.09335951029299	18.91193172182284
99	Kab. Aceh Tamiang	2019	15.60466973770135	18.67459355156438	20.12174086397366	18.78629510829297
100	Kab. Aceh Tamiang	2020	15.60883116797768	18.648916036085	20.01762611046115	18.56178691462162
101	Kab. Bener Meriah	2016	14.98069726267878	18.01202142688617	19.94013799105654	18.97418382179878
102	Kab. Bener Meriah	2017	15.02076425160113	18.22269807386634	19.92241508012699	18.47699699480593
103	Kab. Bener Meriah	2018	15.06153956126671	18.03445261569202	19.92250793313164	18.58402835451912
104	Kab. Bener Meriah	2019	15.10382116145365	18.27467818806765	19.9440357522325	18.74931767997692
105	Kab. Bener Meriah	2020	15.10644163086961	18.06505535004326	19.86662105520457	18.6916067300568
106	Kab. Pidie Jaya	2016	14.63081028063454	17.64385285864172	19.87413649441922	19.27805539036526
107	Kab. Pidie Jaya	2017	14.68715714185362	17.67433248908632	19.8570058351358	18.87554269064201
108	Kab. Pidie Jaya	2018	14.73240364038891	17.86612638400229	19.8572866756016	18.99343487796387
109	Kab. Pidie Jaya	2019	14.77240142038869	18.04716083793034	19.90671241610805	18.86220653057227
110	Kab. Pidie Jaya	2020	14.76125617600128	18.19219924460942	19.83202243766888	18.60431136013741

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAD	ln DAU	ln DAK
111	Kota Subulussalam	2016	13.98743130503802	17.56064071305757	19.66350365622749	19.05782214468154
112	Kota Subulussalam	2017	14.03554468803493	17.85009651896375	19.65500332887611	18.73088292630638
113	Kota Subulussalam	2018	14.07878091949412	17.47793305884761	19.6597700283565	18.12726375049906
114	Kota Subulussalam	2019	14.12202983596023	17.76309376851496	19.68405882087289	18.3509542328105
115	Kota Subulussalam	2020	14.14150432236164	17.85593755523555	19.57768583558489	17.91715611378474

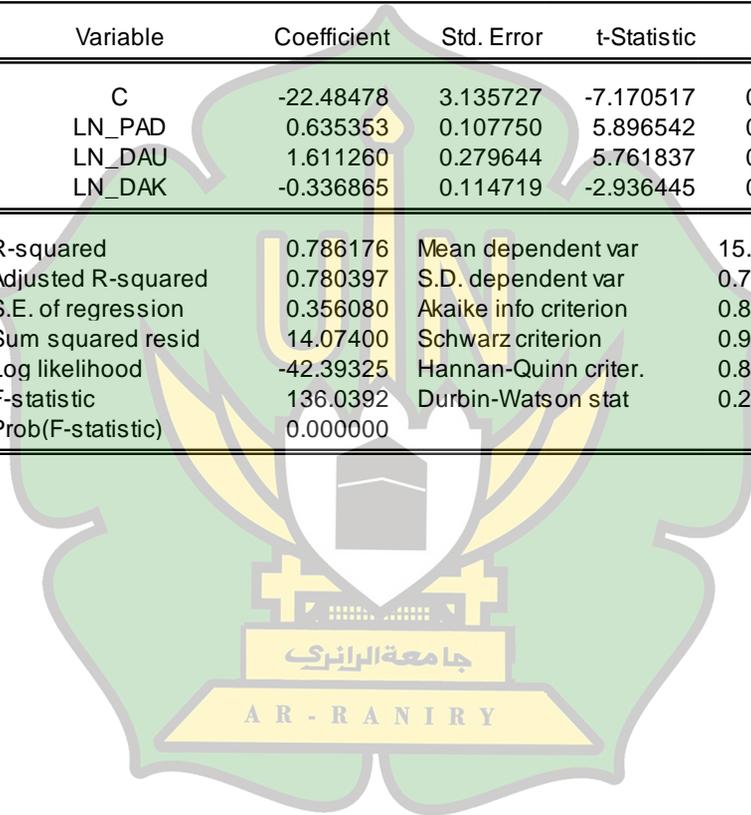


Lampiran 3

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LN_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/11/22 Time: 14:23
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.48478	3.135727	-7.170517	0.0000
LN_PAD	0.635353	0.107750	5.896542	0.0000
LN_DAU	1.611260	0.279644	5.761837	0.0000
LN_DAK	-0.336865	0.114719	-2.936445	0.0040
R-squared	0.786176	Mean dependent var		15.23365
Adjusted R-squared	0.780397	S.D. dependent var		0.759850
S.E. of regression	0.356080	Akaike info criterion		0.806839
Sum squared resid	14.07400	Schwarz criterion		0.902315
Log likelihood	-42.39325	Hannan-Quinn criter.		0.845592
F-statistic	136.0392	Durbin-Watson stat		0.221504
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 4

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LN_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/11/22 Time: 14:27
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.03941	2.752698	6.190077	0.0000
LN_PAD	0.122609	0.035135	3.489637	0.0008
LN_DAU	-0.143517	0.138219	-1.038330	0.3019
LN_DAK	-0.062556	0.020886	-2.995185	0.0036

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996564	Mean dependent var	15.23365
Adjusted R-squared	0.995598	S.D. dependent var	0.759850
S.E. of regression	0.050413	Akaike info criterion	-2.941276
Sum squared resid	0.226187	Schwarz criterion	-2.320683
Log likelihood	195.1234	Hannan-Quinn criter.	-2.689380
F-statistic	1032.401	Durbin-Watson stat	0.936262
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LN_PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/11/22 Time: 14:31
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.340399	2.413320	2.627252	0.0098
LN_PAD	0.189110	0.034098	5.546022	0.0000
LN_DAU	0.325231	0.124930	2.603310	0.0105
LN_DAK	-0.059684	0.020837	-2.864399	0.0050

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.329834	0.9772
Idiosyncratic random		0.050413	0.0228

Weighted Statistics			
R-squared	0.254452	Mean dependent var	1.038842
Adjusted R-squared	0.234302	S.D. dependent var	0.074046
S.E. of regression	0.064793	Sum squared resid	0.465998
F-statistic	12.62790	Durbin-Watson stat	0.536971
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.347842	Mean dependent var	15.23365
Sum squared resid	42.92525	Durbin-Watson stat	0.005829

Lampiran 6

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	247.674627	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	475.033233	22	0.0000



Lampiran 7

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	75.361008	3	0.0000

